



PATTINGALLOANG

Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan

MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SOPPENG 1930-1985

**KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR SEJAHTERA CABANG LIMBUNG
KABUPATEN GOWA (1997-2015)**

**USAHA KERAJINAN GERABAH DI KELURAHAN PALLANTIKANG
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR (1980-2010)**

**DESA TAMMERODO KECAMATAN TAMMERODO SENDANA
KABUPATEN MAJENE (1986-2015)**

**CITTA SEBAGAI BASIS GERAKAN DI/TII
DI KABUPATEN SOPPENG (1950-1965)**

**AGAMA KRISTEN DI DUSUN TAMALEA, KECAMATAN KALUMPANG,
KABUPATEN MAMUJU**

**MAPPALILI DI BARRU: KAJIAN SEJARAH SOSIAL MASYARAKAT
PETANI BARRU (1959-2015)**

**PASAR ULUTEDONG DI KECAMATAN UJUNGLOE KABUPATEN
BULUKUMBA 1982-2015**

**KABUPATEN MAMUJU PADA MASA PEMERINTAHAN
SUHARDI DUKA (2005-2015)**

FRONT MAHASISWA NASIONAL MAKASSAR (2007-2014)

**PABRIK ROKOK SEJAHTERA 57 DI MACANRE
KABUPATEN SOPPENG (2007-2014)**

**DINAMIKA HIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
NELAYAN PATORANI DI KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR 1890-2014**

**PEMBANGUNAN DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU (1989-2014)**

**PENDIDIKAN DI KABUPATEN BARRU PADA
MASA ORDE BARU 1967-1998**

**DESA UMPUNGENG KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG
(1991-2015)**

**LUWU PADA MASA PEMERINTAHAN H. BASMIN MATTAYANG
PERIODE (2004-2009)**

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR 1990-2015

**MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI YANG DEMOKRATIS,
HARMONIS DAN PARTISIPASI
DI INDONESIA**

**Diterbitkan Oleh Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar**



PATTINGALLOANG

Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan

Pembina:

Rektor Universitas Negeri Makassar
Dekan Fakultas dan Ilmu Sosial

Penanggungjawab

Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah

Pemimpin Redaksi

Bahri

Sekretaris Redaksi

Amirullah

Dewan Redaksi

Burhanuddin Pabitjara

Amiruddin

Muh. Rasyid Ridha

Patahuddin

La Malihu

Jumadi

Redaktur Ahli

Rabihatun Idris

Mustari Bosra

Najamuddin

Muhammad Saleh Madjid

Ahmadin

Redaktur Tamu

Anhar Gonggong

Susanto Zuhdi

Edward L. Poelinggomang

Helius Syamsudin

Staf Redaksi

Bustan

Alamat Penerbit/Redaksi:

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Gedung FIS Lt.3, Kampus Gunungsari Baru Jl. Raya Pendidikan Makassar 90222 Tlp. 0411-855105 atau 081242947419 (Bustan), 082395232077 (Amirullah)

Pengantar Redaksi

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Pattingalloang Edisi XII dapat hadir di hadapan pembaca. Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, yang terbit empat kali setahun (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember), pada edisi ini menampilkan ragam wacara kesejarahan dan pendidikan. Dalam upaya perampungan, tim redaksi dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat niat suci, keteguhan hati, serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka tulisan edisi XII ini dapat terwujud. Oleh karena itu, sepantasnya dihaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah atas bimbingan dan arahnya dalam penulisan artikel ini, demikian pula dengan penulis atas partisipasinya dalam jurnal ini.

Tim redaksi menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam tulisan ini. Untuk itu diharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tulisan ini di masa yang akan datang. Akhirnya harapan dan do'a kami haturkan kepada-Nya semoga budi baik dari semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin...

Salam Redaksi,

Daftar Isi

Muhammadiyah di kabupaten soppeng 1930-1985	1
Koperasi simpan pinjam makmur sejahtera cabang limbung Kabupaten gowa (1997-2015)	11
Usaha kerajinan gerabah di kelurahan pallantikang Kecamatan pattallassang kabupaten takalar (1980-2010)	15
Desa tammerodo kecamatan tammerodo sendana Kabupaten majene (1986-2015)	24
Citta sebagai basis gerakan di/tii Di kabupaten soppeng (1950-1965)	33
Agama kristen di dusun tamalea, kecamatan kalumpang, Kabupaten mamuju	41
Mappalili di barru: kajian sejarah sosial masyarakat Petani barru (1959-2015)	48
Pasar ulutedong di kecamatan ujungloe kabupaten Bulukumba 1982-2015	59
Kabupaten mamuju pada masa pemerintahan Suhardi duka (2005-2015)	67
Front mahasiswa nasional makassar (2007-2014)	81
Pabrik rokok sejahtera 57 di macanre Kabupaten soppeng (2007-2014)	90
Dinamika ehidupan sosial ekonomi masyarakat Nelayan patorani di kecamatan galesong kabupaten Takalar 1890-2014	96
Pembangunan desa corawali kecamatan tanete rilau Kabupaten barru (1989-2014)	105
Pendidikan di kabupaten barru pada Masa orde baru 1967-1998	
Desa umpungeng kecamatan lalabata kabupaten soppeng (1991-2015)	117
Luwu pada masa pemerintahan h. Basmin mattayang Periode (2004-2009)	124
Politeknik ilmu pelayaran (pip) makassar 1990-2015	134
Membangun masyarakat madani yang demokratis, Harmonis dan partisipasiDi indonesia	147

MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI YANG DEMOKRATIS, HARMONIS DAN PARTISIPASI DI INDONESIA

A. ACO AGUS
Dosen PPKn FIS UNM

ABSTRAK

Masyarakat madani (*Civil Society*) adalah masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreatifitas dan dinamikannya secara egaliter dan kompetitif, memiliki etos kerja, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan dilandasi oleh iman dan taqwa menuju cita kehidupan yang telah disepakati serta di atur oleh norma hukum dengan sistem yang transparan. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat madani yaitu : wilayah publik yang bebas (*Free publik sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan (*pheralism*), keadilan sosial. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan melalui integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik, demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik. Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia yaitu : *publikfrust clientelisme* yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pengusaha, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, tingginya angkatan kerja yang belum terserapi karena lapangan kerja yang terbatas.

Kata Kunci : Masyarakat Madani, Demokratis, Harmonis dan Partisipasi

PENDAHULUAN

Pada dasarnya gagasan masyarakat madani seluas wacana Barn Gelliner menelusuri akar gagasan ini ke masa lampau melalui sejarah peradaban barat (Eropa dan Amerika) antara lain ketika konsep ini pertama kalinya dipopulerkan secara gambelang oleh pemikir terkenal Skotlandia Adam Ferguson (1423-1816) dalam karya klasiknya *An Essay on History of eivil society* (1967) hingga perkembangan konsep masyarakat madani lebih lanjut oleh kalangan pemikiran modern seperti Laeke, Rousseau, Hegel, Marx, Tocgneville, hingga upaya menghidupkannya kembali di Eropa Timur dan Barat di zaman kontemporer.

Gelliner mengemukakan bahwa : kondisi sosial yang didefinisikan sebagai masyarakat madani sesungguhnya bermuara politis definisi paling sederhana dari konsep ini. Menurut Gelliner merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengembangkan negara. Mengimbangi artinya bahwa kelompok ini memiliki kemampuan untuk menghalangi atau membendung negara dalam mendominasi kehidupan masyarakat. Tetapi meskipun demikian berarti bahwa konsep ini mengingkari kegiatan negara dalam menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian dan peran negara sebagai wasit besar yang dapat menghancurkan tatanan sosial dan politik keseluruhan.

Dalam pengertian luas menurut Gelliner, masyarakat madani disamping merupakan sekelompok institusi / lembaga dan assosiasi yang cukup kuat mencegah tirami politik baik oleh negara maupun komunal / komunikasi, juga cirinya yang menonjol adalah adanya kebebasan individu di dalamnya dimana sebagai sebuah asosiasi dan institusi, ia dapat dimasuki serta ditinggalkan oleh individu dengan bebas.

Lebih lanjut Majid (1999:2) mengemukakan masyarakat madani (*Civil Soliety*) sebuah masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan egaliter dan kompetitif menuju cita kehidupan yang telah disepakati bersama-sama, serta diatur oleh norma hukum yang kuat lepas dari pengaruh kelompok atau kekuatan tertentu.

Subtansi Civil Sriciety mencakup lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang sangat luas baik formal maupun non formal yang meliputi antara lain bidang-bidang ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, informasi, interest groups. Gerakan-gerakan penekan (*pressure groups*) pembangunan, organisasi kemasyarakat lainnya, misalnya pengamat DPR, form Diskusi dan lain sebagainya (Suryadi 199 : 9). Pembidangan seperti ini tidak perlu diartikan secara ketat, namun yang lebih penting menjadi ukuran adalah misi keswasembadaan dan kreatifitas kelompok-kelompok itu sehingga bermanfaat bagi pembangunan dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Mengembangkan etos kerja dan optimal serta memiliki sikap dan prilaku yang berintikan pengabdian yang utuh bagi masyarakat (*public service qriented*), inilah harapan masyarakat madani yaitu masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan dilandasi oleh iman dan taqwa.

PEMBAHASAN

A. Konsep Masyarakat Madani

Konsep masyarakat madani yang menjadi perbincangan dewasa ini pada dasarnya mengacu pada konsep civil society yang sudah berkembang di barat, walaupun akhir-akhir ini sedang digali juga pemikiran yang mengacu kepada "masyarakat madani". Konsep civil society yang telah mapan, sekalipun selalu mengalami pemikiran ulang (*rethinking*) itu, bukan merupakan konsep yang universal, melainkan historis-kontekstual. Secara historis, civil society di bentuk oleh tiga kejadian besar di Eropa Barat. Pertama, Reformasi Teologis yang menghasilkan model teknokratisme, baik yang bercorak kapitalisme pasar, sosialisme maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Ketiga Revolusi Perancis dan Revolusi

Amerika yang menghasilkan model negara dan masyarakat yang mengacu kepada trilogi liberte, egalite, fraternite dalam berbagai coraknya.

Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep civil society adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional).

Secara politis, melalui konsep civil society dapat diciptakan bentuk hubungan yang kurang lebih semetris, sehingga kondusif bagi terciptanya demokrasi. Dasar asumsinya adalah apabila negara terlalu kuat, negara akan berkuasa, tetapi masyarakat lemah, maka proses demokratisasi akan stagnan atau berjalan di tempat. Secara ekonomis, melalui konsep civil society dapat dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi yang menciptakan kemandirian. Pesan ideologis yang melekat di dalamnya adalah tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi pemilihan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Kemudian secara sosial, melalui civil society dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, atau keseimbangan antara individual participation dan sosialobligations. Dalam konteks ini, konsep civil society kurang lebih sama dengan pengertian gemeinschaft (paguyuban) atau mezzo-structures. Yaitu bentuk pengelompokan sosial yang lebih kompleks daripada bentuk keluarga tetapi juga tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal, seperti lazim dikembangkan oleh negara. Pesan ideologis yang terdapat di dalamnya adalah memerdekakan orang atau menumbangkan pelbagai bentuk penjajahan terhadap kehidupan manusia, sehingga dapat dibangun solidaritas sosial, atau perasaan menjadi satu kesatuan dalam rasa sepenanggungan.

Kelahiran ide civil society kelihatan sebagai bagian dari sebuah kesadaran bahwa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui negara ternyata tidak sederhana. Benar memang ada sejumlah negara yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi berbagai bukti memperlihatkan bahwa sejumlah negara justru menempatkan masyarakat pada posisi inferior dan menjadi sapi perahan. Kehidupan masyarakat menjadi semakin sengsara ketika institusi birokrasi dan institusi politik yang seharusnya berperan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial tersebut didominasi dan ditentukan oleh kemauan rejim yang berkuasa (the ruling class). Ketika kedudukan rejim yang berkuasa terlalu dominan, institusi birokrasi tidak dapat secara optimal melayani publik, karena selalu memperoleh pelbagai macam tekanan. Keadaannya menjadi semakin runyam ketika rejim yang berkuasa tersebut mencanangkan strategi 'politisasi birokrasi' yang menempatkan para birokrat menjadi aparat yang harus loyal pada rejim. Kondisi ini selanjutnya membuat birokrat tidak mampu mengendalikan kemauan dan mengontrol kegiatan rejim berkuasa, sebaliknya mereka justru menjadi kepanjangan tangan rejim tersebut. Para birokrat tidak netral dan dalam segala tindakannya lebih mengutamakan kemauan rejim daripada kepentingan masyarakat. Kekuasaan rejim yang sangat kuat juga dapat membuat institusi politik menjadi mandul.

B. Pengertian Masyarakat Madani

Majid (1999 : 2) mengemukakan bahwa "Masyarakat Madani atau Civil Society dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreatifitas dan dinamikanya secara egaliter dan kompetitif menuju cita kehidupan yang telah disepakati bersama-sama, serta diatur oleh norma hukum yang kuat lepas dari pengaruh kelompok atau kekuatan orang tertentu.

Dawan Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnyanya dalam masyarakat madani warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara, kemudian Rahardjo menjelaskan dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindari diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.

C. Karakteristik Masyarakat Madani

Ubaedillah dan Abdul Rozak (2016 : 225) mengemukakan ada beberapa karakteristik masyarakat madani yaitu :

1. Wilayah publik yang bebas

Free Public Sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Persyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

2. Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, diaman dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk meyakinkan aktifitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasarat demokrasi ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani.

3. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktifitas yang dikemukakan orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktifitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lain berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang "enak" antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai "hikmah" atau "manfaat" dari pelaksanaan ajaran yang benar.

Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani (civil society) lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu kehidupan yang berkualitas dan tamaadun (civil). Civilitas meniscayakan ideransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerasi pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

4. Pluralisme (kemajemukan) merupakan satuan prasarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatacara kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan.

Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaan. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengembangan.

5. Keadilan sosial merupakan keadilan yang menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam pemikiran mengenai format bernegara menuju Indonesia Baru Pasca Orde Baru (era reformasi) teridentifikasi konsep masyarakat madani yang telah berkembang sebagai alternatif pendekatan, karena masyarakat madani berisikan nilai-nilai dan konsep-konsep dasar tertentu yang berguna dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau lebih menyeimbangkan posisi dan peran penentuan yang tetap terasa pada perwujudan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Adapun nilai-nilai dasar masyarakat madani antara lain adalah kebutuhan, kemerdekaan, hak asasi dan martabat manusia, kebangsaan, demokrasi, kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan, keadilan dan supremasi hukum dan sebagainya.

Rosyada (1999) menekankan beberapa aspek dalam citra masyarakat madani yaitu :

1. Komposisi sosial dari masyarakat madani harus terdiri dari masyarakat kreatif, dinamis, serta memiliki etos hidup maju, menuju cita-cita sosialnya. Oleh karena itu masyarakat madani harus terdiri dari masyarakat cerdas, memiliki keterampilan serta keahlian yang memungkinkan mereka mampu untuk berkompetisi secara internal dan bahkan kompetitif dalam kerangka hubungan global.
2. Inisiatif kemajuan baik dalam aspek-aspek kehidupan perekonomian maupun dalam membina kebudayaan maupun peradaban bangsa harus lahir dari masyarakat sendiri, sehingga posisi pemerintah benar-benar memberikan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan dinamika masyarakat.

Sutijpto Wirosardjono (1995) memberikan gagasannya mengenai aspek-aspek dalam membangun masyarakat madani adalah

1. Persamaan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap seluruh anggota masyarakat, tanpa membedakan ras, suku, agama serta strata sosial. Dan prinsip ini, tidak semata ditegakkan dengan pendidikan strukturalisme fungsional yang bertumpu pada kekuasaan tetapi harus menjadi ciri budaya masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum untuk dapat merekayasa budaya kehidupan sosial.
2. Hukum harus ditegakkan dalam prinsip-prinsip kedaulatannya secara idial, yaitu hukum itu harus kuat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa harus membedakan pangkat, golongan, strata sosial, ekonomi masyarakat.
3. Hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat, yaitu bahwa aturan-aturan hukum tersebut adalah hasil-hasil kesepakatan bersama yang disusun dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan pluralisme ras, suku dan agama.
4. Egalitarianisme dalam cara pandang etika sosial yaitu ada perlakuan yang sama terhadap masyarakat dengan tidak membedakan antara elit penguasa ekonomi dan politik dengan yang lainnya dalam seluruh strata yang berbeda-beda.
5. Penghormatan terhadap hak-hak otonomi pengikut agama yakni dalam suatu masyarakat yang pluralistik dalam konteks keberagamannya, masing-masing harus dihormati dan dihargai untuk melaksanakan doktrin keagamaan, khususnya dalam aspek-aspek praktek keagamaannya, dengan tidak saling mengganggu dan juga tidak saling mempengaruhi satu sama lain.

Ubaedillah (2016 : 226) mengemukakan bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia yaitu :

Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi pengikut pandangan ini praktik

berdemokrasi ala barat (demokrasi liberal) hanya akan berakibat konflik antara sesama warga bangsa baik sosial maupun politik. Demokrasi tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di kalangan warga negara, demokrasi hanya akan dipahami sebagai kebebasan tanpa batas yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkis yang berpotensi pada lahirnya kekacauan sosial, ekonomi dan politik.

Kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam tataran ini, pembangunan institusi-institusi politik yang demokrasi lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi. Model pengembangan demokrasi ini pun kenyataannya tidaklah menjamin demokrasi berjalan sebagaimana layaknya. Kegagalan demokrasi di sejumlah negara dalam banyak hal berhubungan dengan tingkat kemiskinan warga negaranya.

Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai bisnis utama pembangunan demokrasi. Pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi. Berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah. Hal itu mengingat bahwa demokrasi membutuhkan topangan kultural, selain dukungan struktural. Usaha-usaha pendidikan dan penyadaran politik warga negara merupakan upaya membangun budaya demokrasi di kalangan warga negara. Secara teoretis, upaya pendidikan dan penyadaran politik kelas menengah dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyadaran ideologi warga negara, sebagaimana pernah disinggung oleh Gramsci (1891-1937 M). Melalui proses pendidikan politik, diharapkan lahir tatanan masyarakat yang secara ekonomi dan politik mandiri. Kemandirian mereka pada akhirnya akan melahirkan kelompok masyarakat madani yang mampu melakukan kontrol terhadap hegemoni negara.

D. Kendala-kendala Membangun Civil Society di Indonesia

Rifdan mengemukakan kendala membangun civil society di Indonesia : a) pertama adalah masalah public trust. Selama ini institusi birokrasi public kita bekerja hampir tidak disertai mekanisme kontrol eksternal baik dari pihak institusi politik (partai dan legislatif) maupun dari media massa dan kelompok kepentingan. Kalaupun dahulu pernah ada, kontrol eksternal itu lebih sering palsu, tidak jujur, dan hanyalah sebuah rekayasa untuk menyenangkan atau mengelabui masyarakat. Hal ini terjadi karena pada saat itu rejim yang berkuasa berada pada puncak strata, dan dengan sewenang-wenang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan politiknya sendiri, b) kedua adalah masalah clientelisme yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pelaku bisnis atau pengusaha. Sedikitnya ada dua macam tipe pengusaha yaitu : (1) the client bourgeois atau pengusaha yang tumbuh besar dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, dan (2) the entrepreneurs atau pengusaha yang tumbuh dan berkembang atas etos dan kemampuannya sendiri selama ini yang berkembang adalah tipe pengusaha the client bourgeoisie. Pengusaha tipe ini pada umumnya tidak memiliki skill yang baik dalam melakukan bisnis yang kompetitif. Mereka sangat tergantung pada kekuatan dan kemurahan penguasa, sehingga yang mereka kembangkan sebenarnya bukan nilai bisnis yang bisa mengembangkan usaha, tetapi lebih pada bagaimana mengembangkan hubungan baik dengan penguasa. Mereka sangat diuntungkan ketika penguasa memonopoli pasar dan berbagai perlakuan khusus dalam kegiatan bisnis. Sebaliknya tipe pengusaha yang kedua (the entrepreneurs), kendati pun mereka memiliki skill yang cukup, namun mereka tidak mudah mengembangkan usahanya. Pada era reformasi sekarang memang sudah mulai terjadi keterbukaan dalam dunia bisnis tidak ada lagi monopoli yang berlebihan dari penguasa. Tetapi situasinya masih jauh dari yang diharapkan bagi terjadinya civil society, karena dunia bisnis kita sebenarnya masih banyak dikuasai oleh the client bourgeoisie dan c) ketiga ada masalah patrimonialisme. Bentuk struktur kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita adalah bersifat mono-litik, di puncak strata ada sekelompok elit minoritas yang superior kemudian pada strata di bawahnya adalah kelompok massa mayoritas yang inferior. Kelompok elit sangat mendominasi berbagai keputusan penting, kelompok massa tidak berdaya, hanya mengikuti kehendak kelompok elit.

Untuk membangun public trust, antara lain harus ada komitmen semua pihak untuk menyelesaikan warisan masalah politik yang masih ada, terutama harus ada keberanian memberikan sangat kepada biang keladi dari masalah politik tersebut. Untuk menghilangkan clientelism, antara lain harus ada transparansi dan mekanisme yang jelas dalam membangun akses pada modal dan pasar. Kemudian untuk melemahkan patrimonialisme harus ada pendidikan politik yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh hak-hak politiknya. Di samping itu juga perlu dikembangkan lembaga-lembaga sosial yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengembangkan kreativitasnya dan terjembatani kepentingan politiknya.

Hambatan Civil Society di Indonesia

1. Masyarakat sipil dan konsolidasi internal : masing-masing Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) masih mengelola isu berdasarkan kepentingan masing-masing dan belum ada kerjasama permanen dan konsisten.
2. Masyarakat Sipil dan Profesionalisme : beberapa organisasi masyarakat sipil yang bekerja di ranah advokasi RSK hanya mengerti masalah mikro atau kurang menguasai aspek makro.
3. Masyarakat Sipil dan Jaringan : organisasi masyarakat sipil di daerah tidak merasa terintegrasi, tersosialisasi dan kurang mengetahui perkembangan itu. Perlu ada kerjasama dengan organisasi di daerah.

Tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia :

1. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan politik, melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan informasi kepada politik.
2. Masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama.
3. Masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :

1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata.
2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar.
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

E. Faktor Pendukung Terciptanya Masyarakat Madani di Indonesia.

Bagaimana mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan. Agenda Jalan Ketiga dapat dijadikan pedoman oleh para community workers dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya di masyarakat. Dalam garis besar agenda itu mencakup dua hal, yaitu : politik-politik jalan ketiga.

Politik jalan ketiga

- Persamaan
- Perlindungan atas mereka yang lemah
- Kebebasan sebagai otonomi
- Tak ada hak tanpa tanggungjawab
- Tak ada otoritas tanpa demokrasi
- Pluralisme kosmopolitan
- Konservatisme filosofis

Program jalan ketiga :

- Negara demokratis baru (negara tanpa musuh)
- Masyarakat madani yang aktif
- Keluarga demokratis
- Ekonomi campuran baru
- Kesamaan sebagai inklusi
- Kesejahteraan positif
- Negara berinvestasi sosial (social investemnt state)
- Bangsa kosmopolitan.

• Demokrasi Kosmopolitan

- Strategi untuk menjalankan Agenda Jalan Ketiga meliputi empat hal :

1. Membangun masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Peningkatan investasi-investasi sosial dan pendistribusian pelayanan-pelayanan sosial dasar yang lebih luas dan adil.
2. Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Strategi ini meliputi desentralisasi pembuatan keputusan dan peningkatan program-program pengembangan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya.
3. Peningkatan masyarakat dan perlindungan hak azasi manusia, kebebasan berorganisasi dan menyatakan, penetapan struktur-struktur hukum bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan praktek-praktek pemerintahan yang menjamin konsultasi dan pengakuan hakiki terhadap fungsi-fungsi organisasi-organisasi lokal.

Sejatinnya, agenda utama bagi para community workers dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan adalah mengetahui visi dan makna yang sesungguhnya dari community workers dan masyarakat madani. Seperti kata adagium : visi tanpa aksi adalah mimpi, sedangkan aksi tanpa visi adalah kegiatan sehari-hari

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat madani (*Civil Society*) adalah masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreatifitas dan dinamikannya secara egaliter dan kompetitif, memiliki etos kerja, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan dilandasi oleh iman dan taqwa menuju cita kehidupan yang telah disepakati serta di atur oleh norma hukum. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan

karakteristik masyarakat madani yaitu : wilayah publik yang bebas (*Free publik sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan (*pheralism*), keadilan sosial. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan melalui integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik, demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik. Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia yaitu : *publikfrust clientelisme* yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pengusaha, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas.

Masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam memelopori dan mendorong masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia bisa ia rintis melalui penyelenggaraan program pendidikan, peningkatan perekonomian rakyat bisa ditempuh melalui koperasi dan pemberian modal kepada pengusaha dan menengah. Dua hal ini, dari banyak hal, yang menurut penulis sangat kongkrit dan mendesak untuk digarap oleh elemen-elemen masyarakat madani, khususnya ormas-ormas, guna memelopori dan mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

B. Saran

Masyarakat madani kiranya perlu terus dikembangkan sejalan dengan demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan demokratisasi pendidikan, yang berguna untuk mempersiapkan anak bangsa agar terbiasa berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggungjawab dan turut bertanggung jawab, serta terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan sesama, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya, dan mempelajari kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi. Baik menjadi anggota masyarakat madani maupun perangkat negara hendaknya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, yang dapat membentuk civil society yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra Azyumardi, 1999. Menuju Masyarakat Madani, Cit. I : Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
- Azizi, A Qodri Abdillah. 2000. Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta : Kajian Historis Normatif. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anonim. 2008. Ciri-ciri Masyarakat Madani. <http://www.crayonpedia.org> Diakses pada tanggal 14 Januari 2011.
- Culla, Adi Suryadi, 1999. Masyarakat Madani Pemikiran : Teori dan Relevansinga dengan Cita-cita Reformasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006. Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia : Jakarta, LP3ES.
- Deden, M.Ridwan dan Nurjulianti Dewi (Penyunting), 1999. Pembangunan Masyarakat Madani dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. Cet. I : Jakarta, LSAF.
- Fakih, Mansder, 2000. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gelliner, Ernet dalam Budiman Arief 1990 State and Civil Society the Publications, officer center of southeast ascan studies monash university clayton victoria.
- Gellincer Ernest. 1995. Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan. Cet. Ke I : Bandung, Mizan.
- Hamim, Thoha. 2000. Islam dan Civil Society (Masyarakat Madani) : Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralisme dan Religious Tolerance. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam. Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. Demokrasi dan Civil Society Cet I : Jakarta LP3S.
- Majid, Nurcholish, 2000. Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani Makalah Seminar IAIA Syarif Hidayatullah.
- Rahardjo, M.Dawan. 1990. Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. Cet I : Jakarta LP3S.
- * Rifdan, 2007. Civil Society sebagai Kekuatan Social Control di Indonesia Jurnal Ikhtiar Vol. 5 No.3.
- Rosyada, dede, 1999. Pelayanan Sosial Menuju Citra Masyarakat Madani, Makalah Seminar Pemda DKI Jakarta.
- Ubedillah, A & Abdul Rozak, 2016. Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta. ICEF UIN Syarif Hidayatullah Prenada Media Group.
- Wirosardjono, Sujipto, 1995. Piagam Madinal sebagai Rujukan Pembinaan Masyarakat Utama, Makalah Seminar PP Muhammadiyah Jakarta.